

Pasca Penetapan Eks Jampidsus sebagai Tersangka Yusril Tegaskan Tak Ada yang Kebal Hukum

Jakarta, MIMBAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa proses hukum yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) harus dijalankan secara profesional, transparan, dan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (13/7/2026), menyusul perhatian publik terhadap proses penanganan perkara yang kini telah dilimpahkan kepada

■ Bersambung ke Hal 11



Polri Gandeng Pegadaian

KEPOLISIAN menggandeng PT Pegadaian (Persero) untuk melakukan pengecekan kadar emas batangan seberat 74 kg yang disita dari perkara korupsi yang menyeret mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Emas batangan tersebut disita dari rumah di wilayah

■ Bersambung ke Hal 11



Kejagung Terima Barang Bukti 74 Kg dan Uang Asing

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) menerima semua barang bukti terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dari pihak kepolisian.

Kabag Ops Kortas Tipikor Polri Kombes Ahmad Yusuf mengatakan, pelimpahan barang bukti dilakukan menyusul penyerahan kasus Febrie ke Kejagung pada Sabtu 11 Juli lalu.

"Jadi secara bertahap seluruh administrasi penyidikan berikut barang bukti akan diserahkan kepada Kejagung untuk ditindaklanjuti," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (13/7).

Yusuf mengatakan pelimpahan perkara juga merupakan hal yang biasa karena ada Memorandum of Understanding (MoU) antara Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan KPK.

"Polri + KPK + Kejaksaan memiliki MoU. Jadi pelimpahan perkara, dan lain-lain adalah hal yang biasa. KPK juga mensupervisi perkara ini sampai selesai," katanya.

■ Bersambung ke Hal 11



Kapolri Tegaskan Polri-Kejaksaan Solid

Jakarta, MIMBAR - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan. Jenderal Sigit memastikan tidak ada masalah antara Polri dan Kejagung.

"Yang jelas saya pastikan di sini, apalagi kita hadirin bersama antara Bapak Jaksa Agung dan seluruh pejabat utama Adhiyaksa. Saya didampingi Wakapolri dan pejabat utama Mabes Polri, tentunya kami sama-sama sepakat dan menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa tidak ada masalah di antara 2 institusi," kata Kapolri di Kejagung, Senin (13/7/2026).

Jenderal Sigit menyebut Polri dan Kejagung sepakat untuk terus bersilaturahmi. Menurutnya, hasil pertemuan dengan Jaksa Agung itu juga akan ditindaklanjuti oleh

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

28 MUHARRAM 1448 H

Imsak : 04:50 WIB	Ashar : 15:59 WIB
Subuh : 05:00 WIB	Maghrib : 18:43 WIB
Zuhur : 12:33 WIB	Isya : 19:57 WIB

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Ujian Kesetaraan Hukum

Oleh Dr. A. Rasyid, MA

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bahwa proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi merupakan penegasan yang patut diapresiasi. Pernyataan tersebut tidak hanya ditujukan kepada aparat penegak hukum, tetapi juga menjadi pesan kepada seluruh masyarakat bahwa negara tidak boleh tunduk pada kekuasaan



■ Bersambung ke Hal 11

Kota Medan Alami Kelangkaan BBM

Medan, MIMBAR - Kelangkaan BBM tengah melanda Kota Medan. Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di berbagai wilayah, termasuk Jalan William Iskandar, Jalan Brigjen Katamso, dan kawasan Simpang Pos, kehabisan stok untuk berbagai jenis BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Bio Solar. Akibatnya, antrian kendaraan mengular hingga berjam-jam.

Masalah ini dipicu oleh terganggunya rantai

■ Bersambung ke Hal 11



Ketika Sepiring Nasi Menjadi Ladang Bisnis

Oleh: Masrin

Ternyata persoalan terbesar dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya persoalan menu. Saya sempat mengira perdebatan hanya akan berkisar pada ukuran porsi, kandungan protein, kualitas bahan makanan, atau standar gizi yang diterima anak-anak.

Namun semakin lama saya mengikuti perkembangan program ini, semakin saya menyadari bahwa persoalannya mungkin jauh lebih besar. Persoalannya bukan hanya makanan. Persoalannya adalah uang. Dan jumlahnya tidak sedikit.

Program Makan Bergizi Gratis bukanlah program kecil yang



■ Bersambung ke Hal 11

Komisi III Tanggapi Isu DPR Tolak RUU Perampasan Aset

Hinca: Hoaks Itu

Jakarta, MIMBAR - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan memastikan isu DPR menolak RUU Perampasan Aset dari pemerintah tidak benar alias hoaks.

Hinca mengaku heran isu tersebut beredar di media sosial. Padahal, rapat-rapat RUU Perampasan Aset masih berjalan

■ Bersambung ke Hal 11

KORAN
MIMBAR UMUM
HARGA BARU
BERLANGGANAN KORAN

1 BULAN	= Rp. 20.000
12 BULAN	= Rp. 120.000

TERSEDIA DI
myedisi
reader

BISA DOWNLOAD APLIKASI DI
Google Play
App Store



■ Memang gak ada ya ...
■ Hehehe ...

